

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Tesis ini bertujuan mengkaji praktik diplomasi bencana dan problematika Multi Level Governnace yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan barat dalam mengelola suatu isu bencana sehingga perlu adanya kolaborasi dari berbagai stakeholder untuk dapat menanggulangi bencana kabut asap dari sisi pra dan post- disaster sehingga dapat tercipta hasil yang komprehensif. Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada *sub-nasional* yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan barat. Hal tersebut dilandaskan oleh beberapa argumen pokok, seperti: Pertama, Permasalahan hubungan internasional saat ini, tidak hanya berfokus pada masalah tradisonal atau high politic, melainkan hal yang sifat low politics atau sudah menyentuh ketahanan manusia/ human security menjadi perhatian dunia internasional, termasuk permasalahan lingkungan atau pencemaran udara seperti kabut asap ini.

Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, disebutkan bahwa dalam merespon penanggulangan bencana, terdapat berbagai elemen perangkat nasional dan internasional yang dapat terlibat, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah memiliki kontribusi, Pada penelitian ini difokuskan pada melihat upaya manajemen bencana yang dilakukan tiga level tersebut. Indonesia merupakan sebuah Negara yang pada sejarahnya tercatat memiliki catatan panjang terkait bencana. Hal itu tercatat dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu baik yang bersifat geologi, hidrometeorologi, biologi, social atau *man mad disaster*.¹ Isu bencana Kabut Asap bukan hal yang lazim terjadi di Indonesia. Kabut Asap dapat dikategorikan sebagai bencana nasional di Indonesia dikarenakan dampaknya dan hal yang selalu rutin terjadi di setiap tahunnya. Ketiga, isu global saat ini merupakan isu yang tidak bisa ditangani secara

¹ Dwi Wahyuni, *Permasalahan Kabut Asap dalam Hubungan Indonesia dan Malaysia pada periode 1997-2006*, Program Studi Hubungan Internasional FISIP: UIN Syarif Hidayatullah, dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24117/1/DWL.pdf>

sepihak/ oleh beberapa instansi terkait, perlu adanya kolaborasi sehingga output yang dihasilkan dapat sesuai.

Pada tahun 2015, tercatat Indonesia kembali dengan bencana Kabut Asap yang menuai perhatian nasional dan internasional cukup tinggi dikarenakan intensitas waktu bencana yang berlangsung cukup panjang serta dampak negatif yang ditimbulkan. Kabut asap yang terjadi di beberapa provinsi, seperti Riau, Kalimantan Barat, Pekanbaru, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah. Khususnya yang terjadi di Kalimantan barat, Kabut Asap yang terjadi membuat Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menetapkan status siaga Darurat Kabut Asap sejak 8 September 2015 dikarenakan dampak yang terjadi telah meluas, seperti terganggunya jadwal penerbangan, gangguan kesehatan, kerugian ekonomi dan terganggunya ekosistem.²

Hal ini menjadi menarik bagi peneliti untuk diteliti dikarenakan beberapa hal, seperti: Pertama, Fase 2015 merupakan tahun dimana bencana kabut asap merupakan bencana yang cukup parah sepanjang sejarah bencana asap di Indonesia, Kedua, dampak yang ditimbulkan sangat merugikan tidak hanya pada lingkup nasional namun regional, dan ketiga, Kalimantan Barat merupakan provinsi yang menjadi objek penelitian dikarenakan merupakan salah satu dari enam titik provinsi yang mengalami bencana tersebut, dan keempat untuk sumbangan terhadap keilmuan khususnya dalam memahami diplomasi bencana, Ilan Kelman merumuskan bahwa terdapat jalur-jalur yang membuat praktik diplomasi bencana tersebut berhasil dan gagal. Dalam penelitian ini, peneliti akan merujuk pada ketidakmaksimalan praktik diplomasi bencana oleh Pemerintah Provinsi Kalbar dengan menggunakan asumsi jalur-jalur yang dapat membuat diplomasi bencana tersebut gagal menurut Ilan Kelman.

Serta hal yang menjadi menarik untuk dilakukan penelitian adalah bencana kabut asap ini merupakan bencana rutin yang terjadi disetiap tahun yang semakin waktu ke waktu dampak negatifnya cukup tinggi. Seharusnya Negara sangat berperan penting dalam menjamin hak warga negaranya atas jaminan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, namun pada pengimplementasiannya hal tersebut sulit dilakukan oleh Indonesia, terlebih

² Ibid

setiap permasalahan bencana kabut asap, sulit untuk menetapkan sebagai bencana nasional padahal dampak negatifnya sudah mengganggu pada ketahanan manusia atau *human security*.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara di kawasan Asia Tenggara sebagai Negara yang menjadi sumber dari kabut asap. Pada umumnya kabut asap yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan.³ Hal tersebut terindikasi dari penelitian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, bahwa 90% penyebab kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia dari tahun 1997-2006 adalah disebabkan oleh 90% oleh factor manusia dan 10% factor alam.⁴ Fenomena kabut asap ini menjadi bencana yang rutin terjadi di Indonesia dikarenakan aktifitas kebakaran hutan dan lahan yang tinggi serta masih minimnya penanggulangan bencana tersebut.

Sejarah mencatat bahwa kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang menyebabkan kabut asap berdampak hingga ke negara tetangga dan menuai respon dunia internasional. Pada tahun 1982, Indonesia mengalami kebakaran hutan yang cukup besar, sekitar 161.798 ha lahan dan 1997 juga mengalami kebakaran hutan yang cukup besar 263.991 ha.⁵ Menurut David Glover, Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 berdampak tidak hanya pada lingkungan domestic namun hingga regional.⁶ Hal tersebut seperti, kabut asap menyebabkan kerugian dalam berbagai sector, seperti kesehatan, transportasi, perkebunan, keanekaragaman hayati dan sebagainya. Selain itu, kabut asap juga berdampak hingga lingkup regional, Malaysia merupakan Negara tetangga yang terkena dampak dari kabut asap tersebut. Sehingga, Malaysia mengalami kerugian akibat dampak kabut asap tersebut, US \$ 32 juta, serta mengalami kerugian berupa penurunan jumlah wisatawan dan pengeluaran biaya kesehatan.

Fase tersebut kemudian terulang lagi pada tahun 2015, Indonesia mengalami bencana kabut asap yang tidak seperti sebelumnya. Tahun 2015, merupakan periode bencana kabut asap terpanjang sepanjang sejarah. Hal tersebut terlihat dari Direktur

3 Ibid

4 Yetti Rusli, *Data Strategis Kehutanan 2008*, Jakarta: Departemen Kehutanan, 2008, dalam ibid

5 Diah Sulistiowati, *Kabut (Asap) Bikin Kalut*, dalam <http://www.wwf.or.id/?40364/Kabut-Asap-Bikin-Kalut>

6 David Glover and Timothy Jessup, *Kerugian Lingkungan Akibat Kebakaran dan Asap di Indonesia*, dalam Dwi Wahyuni, op.cit

Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Abetnego Tarigan mengatakan bahwa kabut asap akibat kebakaran hutan yang mengepung Indonesia, khususnya wilayah Sumatera dan Kalimantan di tahun 2015 menjadi puncak bencana kabut asap dari tahun-tahun sebelumnya.⁷ Selanjutnya bencana kabut asap tersebut juga menuai respon dari dunia internasional, Ilmuwan Goddard Institute for Space Studies NASA, Dr. Robert Field mengemukakan “kabut asap akibat pembakaran lahan dan hutan di Indonesia sudah mencapai krisis polusi udara terburuk sepanjang sejarah”.⁸ Sehingga dampak yang terjadi menyebar tidak hanya pada lingkup domestic namun juga berdampak hingga lingkup regional.

Bencana Kabut Asap yang terjadi pada tahun 2015 meliputi enam provinsi di pulau Sumatera dan pulau Kalimantan (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan). Kalimantan Tengah dan Riau merupakan dua provinsi teratas yang mengalami akibat kabut asap yang tinggi dari enam provinsi. Provinsi Riau merupakan provinsi yang telah mengalami dampak dari kebakaran hutan sejak Januari 2015, dan meningkat pada Juni 2015. Sehingga jelas mengalami dampak yang cukup signifikan.

Provinsi Riau dan Kalimantan tengah merupakan provinsi yang mendapatkan perhatian terkait dampak kabut asap yang ditimbulkan. Dari data yang diperoleh 29 Juni-29 Oktober 2015, dampak yang ditimbulkan yaitu ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara) yang berada pada posisi >400.⁹ Indeks tersebut sejatinya menunjukkan kondisi pada level sangat berbahaya, dan dialami tidak hanya kedua provinsi tersebut namun ke enam provinsi tersebut juga berada pada level sangat berbahaya.

7 Monalisa, *WALHI: Tahun ini puncak bencana Kabut Asap*, dalam <http://www.antaranews.com/berita/517705/walhi-tahun-ini-puncak-bencana-kabut-asap>

8 Charlie Cooper, *Indonesia under pressure to control forest fires cloaking the country and its neighbours in smoke*, dalam <http://www.independent.co.uk/news/world/asia/indonesia-under-pressure-to-control-forest-fires-cloaking-the-country-and-its-neighbours-in-smoke-a6678546.html>

9 ISPU merupakan Indeks Standar Pencemaran Udara yang dapat diperoleh dari Dinas Kesehatan atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) ATAU Laboratorium Kesehatan Daerah dan Pemantau lainnya. Parameter yang diukur adalah debu/patikulat (PM-10), sulfur dioksida (SO₂), Karbon Monoksida (CO₂), Ozon (O₃), DAN Nitrogen dioksida (NO₂). Kategori bahaya sebagai berikut: (0-50=Baik), (51-100=Sedang), (101-199=Tidak Sehat), (200-299= Sangat Tidak Sehat), (300-399= Berbahaya), (>400= Sangat Berbahaya), dalam _____, Masalah Kesehatan akibat Kabut Asap Kebakaran hutan dan Lahan Tahun 2015, Kementerian Kesehatan RI Pusat Data dan Informasi, ISSN 2442-7659, dari <http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-asap.pdf>

Terkait dengan kabut asap tersebut, juga direspon oleh negara tetangga dikarenakan dampak kabut asap tersebut menyebar hingga regional Asia Tenggara. Malaysia dan Singapura hingga meliburkan kegiatan pendidikan dan juga hingga berdampak ke Thailand dan Filipina. Negara-negara tetangga yang terkena dampak tersebut tidak sepenuhnya menyalahkan Indonesia, namun beberapa negara tersebut seperti Singapura, Australia, Jepang, Rusia, dan Malaysia mengirimkan petugas dan pesawat pemadam kebakaran Bombardier CL-415-MP untuk membantu memadamkan api di hutan Sumatera dan Kalimantan.

“Singapura mengirimkan 34 petugas dan helikopter Chinook. Helikopter ini mampu mengangkut 5.000 liter air. Rusia mengirimkan dua pengebom air Beriev BE-200. Pesawat jumbo ini sanggup menyedot dan mengangkut air hingga 12 ribu liter. Australia menerbangkan pesawat Lockheed L-100-30 ke Sumatera Selatan”.¹⁰

Sedangkan pemerinatah nasional merespon dengan berbagai bantuan yang diwakili oleh BPNB melakukan pemadaman secara besar-besaran terhadap kebakaran hutan yang terjadi di beberapa titik wilayah di Kalimantan dan Sumatera.¹¹

Kalimantan Barat merupakan provinsi yang dijuluki “seribu sungai” dikarenakan beriklim tropic basah. Menurut Indeks Resiko Bencana Indonesia, Kalimantan Barat sangat rawan akan adanya Banjir, Kebakaran Permukiman, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Abrasi, Kebakaran Lahan dan Hutan, Konflik Sosial, Epidemii dan Wabah Penyakit.¹² Hal ini juga yang menjadikan provinsi ini berada pada posisi ke enam dari provinsi yang mengalami kabut asap dan berada pada urutan ke kedua dari skala enam dalam rentang level ISPU pada bulan Oktober.¹³ Walaupun skala berbahaya tidak seburuk Kalimantan Tengah, kabut asap yang terjadi di Kalimantan barat sejatinya mengganggu aktivitas masyarakat dan memiliki dampak yang keras bagi kesehatan. Hal tersebut dikemukakan oleh Walikota Pontianak, Sutarmidji menyatakan kandungan asap di udara

10 _____, *Derita Asap Negara Tetangga*, dalam

http://majalah.detik.com/cb/1acf37b7779dba5bf2bbb2d8851b5245/2015/20151102_MajalahDetik_205.pdf

11 Eva Mazrieva, *BNPB: Sedikitnya 5 Orang Meninggal akibat Bencana Kabut Asap*, dalam

<http://www.voaindonesia.com/content/wawancara-voa-dengan-bnpb-soal-kabut-asap-/2993172.html>

12 Lilik Kurniawan.dll, *IRBI: Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2013*, Jawa Barat: Direktorat Pengurangan Resiko Bencana, ISBN : 978-602-70256-0-8, dalam

http://www.bnpb.go.id/uploads/publication/612/2014-06-03_IRBI_2013_BNPB.pdf

13 Bulan Oktober (berdasarkan peringkat): (1. Kalteng = 2230), (2. Kalbar=622), (3. Riau= 602), (Jambi=514), (Sumsel=478), (Kalsel=132), dalam ibid

sudah melebihi ambang batas. “Statusnya berbahaya. dengan dasar pertimbangan itu kami liburkan aktivitas semua belajar di sekolah hingga SMP”.¹⁴ Selanjutnya juga berdampak pada kesehatan masyarakat pontianak, menurut Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, setidaknya ada 30 ribu warga terkena infeksi gangguan pernapasan atau ISPA sejak Juli hingga September 2015.¹⁵ Selain itu adapun upaya-upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi beserta jajaran Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan berbagai upaya seperti, sosiali, water bombing, hingga Teknik Modifikasi Cuaca (TMC).¹⁶

Namun walaupun provinsi Kalimantan barat telah menetapkan Siaga Darurat, pada prakteknya tidak menetapkan tanggap darurat. Padahal dampak yang ditimbulkan sangat berbahaya hingga merugikan kesehatan masyarakat. Tanggap darurat sangat dibutuhkan untuk dapat melakukan penyelamatan, perlindungan, penanganan dan pemulihan. Selain itu dalam melihat fenomena ini, peneliti melihat bahwa bencana kabut asap ini menarik untuk dilakukan penelitian dikarenakan siklus bencana yang telah berulang setiap tahun yang menjadikan seperti agenda rutin, serta ini perlu menjadi koreksi bagi berbagai pemangku kepentingan untuk dapat melihat isu ini tidak hanya semata-mata kerugian perekonomian, namun pada sisi hak asasi manusia dan ketahanan hidup manusia. Hal ini, bencana kabut asap ini jelas mengganggu aktivitas kehidupan manusia dan mengganggu kesehatan, apalagi fenomena yang terjadi dilapangan bahwa penanganan terhadap korban bencana kurang maksimal. Hal ini merupakan persoalan penting bagi pemerintah, tidak hanya pemerintah pusat, namun seluruh elemen pemangku kepentingan.

C. Tujuan Riset

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penanggulangan bencana kabut asap yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

14 Adi Saputro, *Kabut Asap Kembali Parah, Siswa di Pontianak Jadi Korban*, dalam <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150910154500-20-77915/kabut-asap-kembali-parah-siswa-di-pontianak-jadi-korban/>

15 _____, *Akibat Asap, Ribuan Anak di Pontianak Terkena ISPA*, dalam <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150909161928-24-77688/akibat-asap-ribuan-anak-di-pontianak-terkena-ispa/>

16 _____, *BPBD Kalbar Siapkan Peta Rawan Bencana*, dalam <http://www.pontianakpost.com/bpbd-kalbar-siapkan-peta-rawan-bencana>

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Praktik diplomasi bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan posisi/porsi yang dilakukan oleh tiga level pemangku kepentingan tersebut dalam menanggulangi bencana kabut asap.

D. Kontribusi Riset

Adapun kontribusi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan kajian untuk studi Diplomasi bencana
2. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kalangan akademisi ataupun non-akademisi yang tertarik akan penelitian ini
3. Dapat menjadi kebermanfaatan untuk Pemerintah Provinsi dalam pengambilan kebijakan terkait praktik diplomasi bencana.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, adapun pertanyaan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

Mengapa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum maksimal mengimplementasikan praktik diplomasi bencana dalam merespon bencana kabut asap pada tahun 2015?

F. Studi Pustaka

Pemahaman dalam memahami bencana di era globalisasi ini, menghantarkan akademisi untuk dapat berpikir out of the box. Memahami bencana tidak hanya sebagai musibah yang cenderung membuat sulit dan negatif, Namun khasanah ilmu hubungan internasional saat ini menunjukkan bahwa bencana dapat dimaknai positif jika melakukan pendekatan yang konstruktif

Ilan Kelman dalam *How Disasters Affect Peace and Conflict* melakukan studi kontemporer dalam pendekatannya memahami bencana tidak benar-benar berdampak negative jika dapat dikelola dengan baik. Adanya bencana dapat menjadi instrument untuk

menyelesaikan masalah-masalah konflik politik bahkan social yang meliputi nasional maupun internasional. Penelitian ini menurut Ilan Kelman adalah studi diplomasi bencana tidak hanya meliputi penanganan pasca bencana, namun juga meliputi pra-bencana termasuk pencegahan, kesiapsiagaan, perencanaan, dan mitigasi kerusakan, dan (ii) tindakan pasca bencana termasuk respon, rekonstruksi, dan pemulihan.¹⁷

Lebih dari itu, usaha-usaha pra- dan pasca bencana dilakukan juga dapat memiliki dampak positif untuk dapat menyatukan keadaan sosial dan politik. Menurut Ilan kelman, diplomasi bencana tidak selalu menghasilkan perdamaian yang bersifat positif, namun pada pelaksanaannya terkadang dapat juga menimbulkan konflik, karena isu bencana dipahami tidak memiliki porsi yang besar dalam lingkup diplomasi.

Tsunami Aceh 26 desember 2004 merupakan bencana nasional bagi Indonesia, dengan memakan banyak korban jiwa. Studi kasus tersebut digunakan Ilan Kelman untuk dapat melihat proses diplomasi bencana itu bergerak. Dengan bencana yang begitu parah, seluruh elemen lokal, nasional, dan internasional bersama-sama melakukan rekontruksi untuk dapat membangun bersama. Namun, bencana tsunami Aceh dalam proses diplomasi bencana tidak dapat dikatakan berhasil. Bagi ilan Kelman, proses negosiasi konflik yang terjadi di Aceh telah dilakukan sebelum terjadinya bencana tsunami Aceh, namun bencana tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan perdamaian.

1. Louise K. Comfort

Studi Pustaka Diplomasi bencana tidak hanya dilakukan oleh Ilan Kelman, namun seperti Louise K.Comfort dalam *Disaster : Agent of Diplomacy or Change in International Affairs*,¹⁸ dalam penelitiannya tersebut Louise mengungkapkan bahwa bencana alam dapat dikonstruksikan sebagai perekat hubungan yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik. Memahami konflik yang telah berjalan dan duduk bersama dalam negosiasi untuk menciptakan suatu perdamaian. Dalam hal ini, argumen Louise bahwa “bencana” dapat memfasilitasi kerjasama antar negara –negara yang mungkin dulunya berkonflik. Setidaknya memiliki sedikit persamaan dengan asumsi yang dibangun oleh Ilan Kelman,

¹⁷ Ilan Kelman, *How Disasters Affect Peace and Conflict.*, London: Routledge. 2011

¹⁸ Louise K. Comfort, 2002, “Disaster: Agent of Diplomacy or Change in International Affairs?”, *Disaster Journal*,

bahwa bencana dapat dilihat dari sisi positif untuk bisa menjembatani konflik dan membukan peluang diplomasi baru. Selain itu Louise juga menafsirkan bahwa perlu adanya upaya pemaknaan bencana sebagai isu global, hal itu melihat dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut yaitu seperti banyaknya korban. Sehingga perlu adanya sekuritisasi terkait isu bencana ini menjadi isu global dan dapat meningkatkan kepekaan antar sesama untuk dapat saling berkontribusi dalam menanggulangi bencana

2. Zikri Alhadi

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Zikri Alhadi, dalam *Upaya Pemerintah Kota Padang Untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Ancaman Bencana Gempa dan Tsunami*.¹⁹ Penelitian ini mengungkapkan terkait upaya pemerintah Padang dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dan gempa tsunami. Fokus yang diterapkan adalah dalam menganalisa upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah daerah melalui pendekatan atau model manajemen bencana, dengan jangkauan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa, upaya pemerintah daerah dalam menanggapi bencana tersebut belum dapat dikatakan maksimal. Pemerintah daerah dalam hal ini hanya menggunakan pendekatan tanggap darurat, edukasi kesiapsiagaan yang belum merata, serta system peringatan dini yang belum maksimal. Hal ini tidak sesuai dengan tinjauan pustaka yang digunakan peneliti yaitu Manajemen bencana. Manajemen bencana dalam hal ini merupakan seperangkat aturan atau model yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulan sebelum dan sesudah bencana itu terjadi. Sedangkan pada pelaksanaannya, Pemerintah daerah Padang tidak melakukan kesigapan sebelum bencana itu terjadi (pra bencana).

Namun pada penelitian ini tidak disebutkan upaya pemerintah daerah dalam melakukan kerjasama internasional untuk dapat merespon tanggap bencana, padahal

19 Zikri Alhadi, *Upaya Pemerintah Kota Padang Untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Ancaman Bencana Gempa dan Tsunami*, dalam <http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=download&sub=DownloadFile&act=view&typ=html&id=89235&fityp=potongan&potongan=S2-2015-342240-introduction.pdf>

pemertintah daerah mendapatkan wewenang dari UU No. 24 Tahun 2007 terkait membukan peluang kerjasama internasional untuk tanggap bencana.

3. Ratih Herningtyas dan Surwandono

Penelitian juga dilakukan oleh Ratih Herningtyas dan Surwandono, dalam *Diplomasi Bencana Alam Sebagai sarana Meningkatkan Kerjasama Internasional*, mengungkapkan bahwa pada dasarnya bencana tidak semestinya dilihat dari sisi negatif saja, namun bencana dapat dilihat dari sisi positif. Sisi positif dalam hal ini yang coba diangkat oleh penulis untuk menunjukkan suasa baru dalam memahami isu bencana.²⁰ Disaster diplomacy berusaha digagas oleh penulis dalam melihat dinamika bencana. Bagi penulis, bencana hakikatnya dapat menajadikan alat bagi indonesia untuk dapat menyelesaikan berbagai problem sosial-politik, yang pendekatan high politic terasa sulit untuk menemukan jalan keluar.

Berkaca dari fenomena bencana gempa bumi DIY dan tsunami Aceh yang banyak menelan korban jiwa, kedua bencana tersebut selama 15 tahun terakhir ini digolongkan sebagai “ bencana nasioanl” karena telah memakan jumlah korban lebih dari 180.000 jiwa. Asumsi pemaknaan bencana sebagai musibah yang negatif dan memakan korban, menurut penulis terkadang melahirkan kebijakan yang tidak kooperatif. Bagi penulis, cenderung dengan kerawanan bencana Indonesia, membuat berbagai pemangku kepentingan apatis, padahal sudah seharusnya menjadi tanggung jawab segenap jajaran pemangku kepentingan.

4. Marko Trnski

Multi Level Governance juga tidak hanya ditafsirkan oleh Gary Marks, namun Marko Trnski juga menafsirkan bahwa Multi Level Governance merupakan suatu sistem pemerintahan bertingkat yang meliputi berbagai otoritatif lembaga di tingkat supranasional, nasional dan subnasional pengambilan keputusan.²¹ Model ini merupakan ilustrasi yang terjadi di Uni Eropa dalam memahami sistem negosiasi yang terjadi antara supranasional,

20 Ratih Herningtyas dan Surwandono, *Diplomasi Bencana Alam Sebagai sarana Meningkatkan Kerjasama Internasional*, dalam

<http://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/viewFile/357/394>

21 Marko Trnski, Multi Level Governance in the EU, dalam

<http://www.sustainableislands.eu/BlockImages/InLibraryData/GalleryData/MULTI-LEVEL%20GOVERNANCE%20IN%20THE%20EU%20by%20Marko%20Trnski.pdf>

nasional, regional dan lokal. Dalam memahami multi level governance ini, dipahami bahwa keputusan tidak hanya semata-mata dimonopoli oleh keputusan dari pemerintah pusat, namun melainkan dibagai dalam berbagai tingkatan untuk pembuatan kebijakan yaitu nasional dan subnasional. Melihat dunia yang bergerak pada globalisasi, juga meningkatkan peran aktor-aktor subnasional untuk dapat berinteraksi ke luar dan dalam / dapat bersifat transnasional.

5. Andi Amitya Resty Dwiyantri

Andi Amitya Resty Dwiyantri melalui penelitian, dalam *Peran Diplomasi Bencana Alam Dalam Praktik Paradiplomasi*, yang meekankan pada penggunaan “paradiplomasi” dalam praktik diplomasi bencana. Dalam hal ini penelitian tersbeut mengemukakan era otonomi daerah memberikan wewenang luas pada setiap daerah untuk mengaktualisasikan daerahnya yang dapat bermanfaat dan berkontribusi pada pembangunan. Hal tersebut telah dibuktikan oleh Sulawesi Selatan yang telah membuka kerjasama dengan AIFDR dalam hal pennaggulangan bencana. Namun persoalannya adalah kembali pada pelaku pemerintahan di Sulawesi Selatan yang belum memahami terkait paradiplomasi.

Dari berbagai hasil penilitian yang dilakukan oleh Louise K. Comfort terkait diplomasi bencana, Zikri Alhadi dengan upaya pemerintah Padang dalam manajemen bencana, dan Ratih Herningtyas beserta Surwandono dengan diplomasi bencana sebagai penguatkerjasama internasional di DIY, dan Andi Amitya Resty Dwiyantri dalam *Diplomasi Bencana Alam Dalam Praktik Paradiplomasi*. Pada penelitian ini, peneliti memiliki perbedaan dan persamaan dalam penelitian. Persamaan terletak pada, diplomasi bencana sebagai alat analisa yang digunakan untuk menggambarkan fenomena. Perbedaanya terletak dalam melihat isu bencana, khususnya Kabut asap yang sudah sikus rutin terjadi di Indonesia, peneliti ingin memaparkan bahwa bencana kabut asap ini sudah merupakan bencana yang berdampak pada ketahanan manusia dan bahkan dalam berbagai sisi negara atau pemerintah daerah telah melanggar hak asasi manusia. Selain itu, selalu ada

perdebatan dalam melihat isu bencana ini, khususnya aktor yang berkepentingan dalam menanggulangi kabut asap ini. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan memetakan tiga level pemangku kepentingan dalam melihat isu bencana Kabut asap ini dengan menggunakan Multi Level Governnace.

Dalam hal ini, praktik diplomasi bencana tidak hanya sekedar melihat aktivitas kebencanaan yang diangkat hingga menjadi bencana internasional. Namun terdapat elemen-elemen yang dapat membuat praktik diplomais bencana tersebut berhasil dan gagal. Salah satu keberhasilan dalam praktik diplomasi bencana adalah terciptanya Multiple Level tracks dalam praktik diplomasi bencana, yang dalam hal ini penulis perkuat dengan asumsi teori Multi Level Governance. Bahwa dalam pemecahan suatu isu global diperlukan penanganan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai aktor yang berkepentingan.

G. Kerangka Teoritik

1. Manajemen Bencana

Manajemen bencana merupakan seperangkat rencana yang terdiri dari kegiatan pra-bencana dan pasca bencana. Hal tersebut sejatinya terlihat dalam siklus manajemen bencana. Tujuan dari manajemen bencana ini adalah sebagai berikut:²²

1. mencegah kehilangan jiwa;
2. mengurangi penderitaan manusia
3. memberi informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai risiko, serta
4. mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis.

Selain itu manajemen bencana terdapat tiga kegiatan untuk dapat menunjang pelaksanaan kegiatan, yaitu:

²² Igus Rachmat, Manajemen dan Mitigasi Bencana, dalam <http://web.iaincirebon.ac.id/ebook/moon/Social-Welfare/Disaster/Manajemen%20dan%20mitigasi.pdf>

1. Kegiatan pra bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini;
2. Kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan search and rescue (SAR), bantuan darurat dan pengungsian;
3. Kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Dalam praktiknya, manajemen pra-bencana merupakan permasalahan yang sering dibahas. Bahwa masih terdapat kelalaian dari berbagai elemen untuk memperhatikan/mempersiapkan pra-bencana. Namun pasca bencana adalah kegiatan yang banyak menuai perhatian banyak pihak. Dikarenakan pada tahap ini, berbagai elemen saling mengeluarkan kinerjanya untuk dapat menciptakan perdamaian dalam bencana.

2. Konsep Diplomasi Bencana

Sebelum Kelman menjelaskan tentang apa itu disaster diplomacy, Kelman menjelaskan apa itu bencana alam atau dalam bahasa Inggris disebut dengan disaster. Selama ini kita mengenal bahwa bencana alam adalah sebuah peristiwa yang memiliki dampak kehancuran terhadap kehidupan di muka bumi yang peristiwa ini terjadi dengan sendirinya. Beberapa bencana alam yang kita kenal seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami dan masih banyak lagi bentuk bencana alam. Akan tetapi Kelman di dalam bukunya memiliki pandangan lain, bahwa bencana alam itu tidak dengan sendirinya muncul akan tetapi bencana alam itu muncul akibat dari kebiasaan manusia yang memiliki dampak terhadap terjadinya bencana alam.²³ Walaupun Kelman menyadari bahwa ada beberapa bencana alam yang terjadi secara natural seperti gempa bumi dan gunung meletus.

Disaster diplomacy adalah pendekatan yang secara praktis untuk merespon dan mengkomunikasikan adanya bencana internasional. Pada topik ini terjadinya bencana yang di maksud ialah: gempa, banjir, kecelakaan transportasi, wabah, dan angin topan.²⁴ Dalam memahami diplomasi bencana, hakikatnya juga membahas terkait pra-bencana seperti mitigasi, pencegahan dan upaya mengurangi korban. Namun pada tahap setelah bencana, diplomasi bencana berbicara terkait bagaimana konflik dan perdamaian dipengaruhi oleh

²³ Ilan Kelman, Op.cit

²⁴ Ilan Kelman, Op.cit

bencana. Pada dasarnya aktivitas terkait bencana alam belum pernah menimbulkan diplomasi yang baru, akan tetapi dapat menjadi katalis dan pendukung bagi diplomasi yang telah berlangsung sebelumnya.

Selanjutnya Ilan Kelman dalam bukunya pada bagian Hypothesis and research questions' memulai pengkajian terhadap diplomasi bencana, dimulai dengan pertanyaan: "Apakah bencana alam menyebabkan kerjasama internasional diantara negara-negara yang secara tradisional bermusuhan?".²⁵ Dari pertanyaan tersebut, Kelman dan Koukis memecahkan dua istilah penting dari pertanyaan tersebut, yaitu bencana alam dan kerjasama internasional. Bencana alam menjadi sebuah hal yang buruk karena mengarah pada sebuah konotasi yang dimana menjadikan alam sebagai penyebab dari terjadinya bencana. Atau sesungguhnya secara alamiah bencana alam merupakan hal yang terjadi ketika manusia berinteraksi dengan alam. Dan setelah melewati beberapa analisa, terlebih analisa terhadap sikap dan perilaku manusia yang membawa kepada suatu bencana alam. Berdasar pada studi penelitian di beberapa kasus bencana, bencana alam semakin banyak terjadi, namun tidak banyak perubahan yang terjadi pada alam, kecuali perubahan ekstrim yang banyak terjadi dengan populasi manusia itu sendiri. Sehingga pada kesimpulannya, keputusan yang dibuat manusia merupakan akar dari bencana. Bencana yang terjadi bukanlah alami, tetapi ini dianggap sebagai konstruksi sosial yang terjadi pada masyarakat dunia. Lalu, hal kedua yang menjadi fokus dari Kelman dan Koukis adalah kerjasama internasional yang menganggap bahwa diplomasi internasional yang memang cakupannya meliputi intra-state bersama diplomasi bencana dapat melibatkan yurisdiksi sub-nasional yang berhadapan langsung dengan pemerintah dan negara-negara berdaulat dalam menghadapi permasalahan bencana.

Namun pada praktiknya, diplomasi bencana dapat memiliki output yang berhasil dan gagal. Keberhasilan *disaster-diplomacy* akan dicapai jika nilai-nilai kemanusiaan dan kerjasama antar pihak lainnya dapat tercapai. Penerapan *disaster-diplomacy* dalam jangka panjang membutuhkan kesabaran, kreativitas, dan proses politik yang fleksibel. Aktivitas yang mempengaruhi serta mempromosikan *disaster-diplomacy* yaitu:²⁶

25 Ilan Kelman Op.cit

26 Ilan Kelman, Op.cit

1. *'Avoid forcing'*, refers to the fact that disaster diplomacy cannot be forced nor can it be presumed to work. As with most diplomatic processes, care and extensive communication are needed over the long term to build trust and to avoid misunderstandings or missteps. Additionally, a pace is needed which is not so fast that decision makers lose track of events and decisions but not so slow that progress is limited or is overtaken by other events.
(diplomasi bencana tidak semata-mata dapat bergerak cepat, dibutuhkan proses yang panjang untuk membangun kepercayaan dan menghindari misunderstanding)
2. *'Focusing on disaster, not diplomacy'*, means declining to link disaster-related and diplomatic activities. Such an approach obviously inhibits disaster diplomacy in a direct manner. Conversely, and more importantly, that approach might permit disaster-related cooperation to lay the groundwork for later diplomacy. Collaboration on disaster related activities without further expectations can build trust, make connections, and illustrate successes. Enemies could then use that, if they choose, to generate confidence for pursuing other collaborative endeavours. (kolaborasi pada kegiatan yang berhubungan dengan bencana tanpa harapan dapat lebih membangun kepercayaan, membuat koneksi dan menggambarkan keberhasilan).
3. *'Informal Networks'* refers to communication and interaction away from formal settings. They can be effective in providing disaster diplomacy opportunities and in laying the groundwork for formal negotiations. (mengacu pada komunikasi dan interaksi pada peraturan yang formal. Hal ini dapat mengefektifkan kesempatan *disaster-diplomacy* dan dasar untuk membangun negosiasi).
4. *'Multiple Levels/Tracks'* as a pathway means disaster diplomacy along a single diplomacy track is usually unsuccessful. If disaster diplomacy is led only by sovereign governments, then people can undermine the efforts. (sebagai hal yang termaksud dalam *disaster-diplomacy*, sebelumnya *single diplomacy track* tidak berhasil. Jika *disaster-diplomacy* dilakukan hanya pada kedaulatan pemerintah, maka orang-orang dapat merusak upaya tersebut. *disaster-diplomacy* juga dilakukan oleh beberapa diplomatic atau organisasi seperti aktivis, media, batuan dari perusahaan, atau kepentingan agama, pemerintah. *Disaster-diplomacy* membutuhkan *multiple levels/tracks* mengkombinasikan *multiple diplomacy track* sebagai indikasi keberhasilan *disaster-diplomacy*).
5. *'Multi way process'*, indicate that, without exchange amongst all those involved in disaster diplomacy, it is unlikely to proceed far. Rather than one state, organisation, or diplomacy track pushing the process, making concessions, or suggesting how to proceed, a continual exchange of ideas and steps is needed to achieve the desired success.
6. Selanjutnya keberhasilan *disaster-diplomacy* yaitu dengan adanya *'science'* yang berhubungan dengan beberapa tingkatan untuk mendapatkan *informal networks*).
7. Dan terakhir *symbolism* sebagai jalan terakhir keberhasilan *disaster-diplomacy*, *symbolism* di gunakan dalam aktivitas *disaster-diplomacy* pada poin pembuatan

diplomasi. Pada dasarnya *symbolism* juga dapat ditolak yang berhubungan dengan bencana, serta mencegah terjadinya *disaster-dilomacy*.

Keberhasilan *disaster-dilomacy* dapat dicapai dengan beberapa jalan yang sudah dijelaskan, bahwa indikator keberhasilan *disaster-dilomacy* melalui tahap-tahap dari jaringan, kerjasama aktor, multiple diplomasi, keilmuan dan *symbolism*.

Selanjutnya tidak hanya Keberhasilan yang diungkapkan oleh Ilan Kelman dalam Studi diplomasi bencana, Kelman Juga memaparkan jalur-jalur yang dapat membuat kegagalan dalam diplomasi bencana, sebagai berikut:²⁷

1. Avoiding Diplomacy, is a reason for refusing to collaborate one disaster-related activities. The concern of the parties involved might not be specifically to avoid disaster diplomacy, but to avoid any form of diplomacy. Alternatively, this pathway can be invoked to demonstrate independence.
2. Dependency on disaster, can be counterproductive. Many disaster-related activities occur over the short term, especially relief and response, whereas diplomacy usually requires extensive efforts over the long term. Little expectation exists that depending solely on disasters would be likely to produce lasting diplomatic success, although the wider scope of disaster-related activities over the long-term might have more chances for success.
3. Disaster as a weapon, Employing this pathway could make it difficult for parties in conflict to reconcile over this, or a similar or parallel, disaster.
4. Disaster worsening relations, That particularly occurs when the disaster does not involve an environmental phenomenon and when an enemy is considered to have been involved in the disaster.
5. Distraction, pathway means that disasters diplomacy is not always an appropriate pathway for disaster-related activities or for diplomacy.
6. Events overwhelming disasters, suggest that non-disaster processes or events can influence diplomacy more than disaster.
7. Expectations, pathway is about raising diplomatic expectations beyond what could realistically be achieved.
8. False Propinquity, refers to the assumption that states being near each other should cooperate simply on the basis of their propinquity. In reality, propinquity's role in promoting a humanitarian imperative alongside rapprochement could be overstated.
9. Spotlight, when a peace process becomes prominent, especially following a disaster, a spotlight is often placed on every word, action, and innuendo which is publicised, analysed, and misanalysed.
10. Vindictiveness, offering aid can be used to take advantage of an enemy's trouble or to highlight an enemy's weaknesses in contrast to one's own strengths.

27 Ilan Kelman, Op.cit

Pada penelitian ini, memfokuskan melihat belum maksimalnya peran Pemerintah Provinsi Kalbar dalam praktik diplomasi bencana, hal tersebut dilihat dari indikator-indikator keberhasilan menurut Ilan Kelman.

3. Multi Level Governance

MLG ini merupakan pendekatan baru di Uni Eropa dalam memahami kebijakan Uni Eropa. Aktor subnasional dalam hal ini memiliki daya partisipasi yang kuat dalam perumusan kebijakan di Uni Eropa, dikarenakan disetiap level kepentingan memiliki sumber daya penting, seperti informasi, kekuatan politik, keahlian dan prestise, dan semua terlibat dalam hubungan negosiasi.²⁸ Oleh karena itu karena mengaku pentingnya keahlian dimasing-masing pihak, aktor subnasional berhak untuk bergerak tanpa harus menunggu kendali dari pemerintah pusat. Namun dalam beberapa hal, kolaborasi sangat dibutuhkan dan diperlukan dalam berbagai lingkup perumusan kebijakan, seperti perundingan antara Uni Eropa, aktor nasional dan subnasional sangat penting dalam kaitannya terkait dana struktural.

Sehingga di Uni Eropa Multi Level Governance merupakan suatu proses/ level pemerintahan di mana otoritas dan membuat kebijakan-pengaruh dibagi di beberapa tingkat pemerintahan; subnasional, nasional dan supranasional. Dengan kata lain, negara-negara 'membayar' harga di kedaulatannya dan kompetensi nasional mereka untuk mendapatkan prestasi di bidang lain. Sehingga Multi Level Governance ini memiliki beberapa argumen utamanya di Uni Eropa:²⁹

1. Integrasi Eropa Artinya bahwa kapasitas pengambilan keputusan dalam Uni Eropa terletak di sejumlah tingkat yang berbeda. supranasional lembaga Uni Eropa, tingkat nasional pemerintah dan (tingkat dan dengan demikian transnasional) sub-nasional aktor sub-negara seperti pemerintah dan kelompok kepentingan lokal. Negara tidak lagi memonopoli dalam pembuatan kebijakan atau agregasi kepentingan domestik sekalipun ditingkat level domestik
2. Kedua, integrasi Eropa berarti hilangnya kedaulatan untuk negara (atau pemerintah lebih akurat nasional). Sebaliknya Namun integrasi Eropa

28 Marko Trnski, Op.cit

29 Nugent, N. (2003). The Government and Politics of the European Union. Palgrave: Basingstoke, dalam _____, Multi Level Governance: Theory or Useful Coceptualisation, dalam <http://hum.port.ac.uk/europeanstudieshub/wp-content/uploads/2013/05/Module-4-extract-8-multi-level-governance.pdf>

- telah meningkatkan kapasitas badan supranasional dan aktor sub-nasional yang kini beroperasi melintasi batas-batas nasional.
3. Kompetensi dimiliki oleh setiap pengambilan keputusan di tingkat yang berbeda dan bukan dari dimonopoli oleh eksekutif negara. Lembaga supranasional memiliki pengaruh bebas dalam penyusunan kebijakan dan peranan mereka harus dijadikan laporan agar dapat menjelaskan pembuatan kebijakan di Eropa.
 4. Aktor subnasional beroperasi di kedua arena nasional dan supranasional, menciptakan asosiasi transnasional dalam proses.

Menurut Gary Marks, Multi Level Governance merupakan dan khususnya untuk memahami analisa kebijakan politik supranasional Uni Eropa. Dalam hal ini aktor subnasional dan masyarakat juga memiliki peran yang sangat kontributif dalam perumusan kebijakan. Gary Marks pun menempatkan tingkatan level pemerintahan yang bertingkat dalam tiga level, yaitu lokal (sub-nasional), nasional dan global (supranasional).³⁰ Dalam hal ini setidaknya “desentralisasi” mengalami peningkatan, bahwa aktor nasional tidak memegang kendali penuh seperti sentralisasi, namun juga memberikan wewenang terhadap aktor subnasional untuk dapat menunjukkan kompetensi khususnya berinteraksi dengan dunia internasional. Dalam hal ini contohnya adalah sebagai berikut:³¹

“REDD+ governance can be characterized as a type of MLG. For example, REDD+ governance involves supranational governance facilitated by global level institutions such as the World Bank’s Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) and United Nations (UN)-REDD. Nationally, the governments of developing countries are seen to play an important role in implementing diverse policy measures in order to reduce rates of deforestation and forest degradation. However the achievement of this task is also recognized to require the active participation of subnational state and nonstate actors such as involved industries and, especially, the communities that actually manage and use forests.”

Multi Level Governance pada awalnya digambarkan sebagai "sistem negosiasi yang terus menerus antara pemerintah yang berada di beberapa tingkatan wilayah - supranasional, nasional, regional dan lokal yang khas pada kebijakan struktural Uni Eropa. Namun definisi tersebut semakin diperluas untuk mencakup interaksi antara pemerintah di

30 Moeko Saito-Jensen, *Theories and Methods For the Study of Multilevel Environmental Governance*, dalam http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BCIFOR1502.pdf

31 Ibid

luar Uni Eropa. Multi Level Governance ini memiliki dua model, yaitu vertikal dan horizontal, yaitu:³²

1. Dimensi Vertikal. Hubungan antara beberapa tingkat pemerintahan, pemerintah nasional dan daerah tidak akan efektif menerapkan strategi secara terpisah dari level lainnya tentang pemerintahan.
2. Dimensi Horizontal. Hubungan dalam satu tingkat pemerintahan, terlihat pada tingkat koordinasi antar instansi pemerintah dalam kota, wilayah atau pemerintah nasional mengenai kebijakan lintas sektoral.

Lisbet Hooghe and Gary Marks berpendapat terdapat dua tipe pendekatan multilevel governance, yaitu:³³

1. (Tipe I) terjadi persebaran kewenangan (authority) kepada beberapa level (tiers of governance). Di dalam pendekatan tipe pertama ini, terdapat hirarki antar masing-masing tingkatan kewenangan dengan meletakkan negara tetap menjadi central authority dalam pembuatan kebijakan baik itu di tingkat domestik maupun internasional. Sehingga, posisi governance yang terbentuk tetap dibawah negara.
2. Tipe kedua pendekatan multilevel governance melihat dalam suatu isu terdapat beberapa governance dan aktor lain yang sama-sama bekerja untuk mengatasi suatu isu melalui tingkatan pemerintahannya masing-masing. Tipe kedua pendekatan ini melihat governance yang terbentuk sebagai new spheres of authority yang terlepas dari tingkatan kewenangan karena tidak terdapat hirarki di dalamnya. Governance baru yang terbentuk nantinya tidaklah berada di bawah pemerintah pusat tetapi berada di wilayah kewenangan yang berbeda.

H. Hipotesa

Terdapat praktik diplomasi bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan barat dalam menanggulangi Kabut asap, namun masih dalam skala kecil. Hal ini bisa terjadi dikarenakan belum terciptanya multi Level/tracks dalam langkah praktik diplomasi bencana.

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

32 Nigel Jolla, Sara Bryn Pasquier, *Innovations in Multi-Level Governance For Energy Efficiency: Sharing Experience with multi-level governance to enhance energy efficiency*, dalam https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/mlg_final_web.pdf

33 L. Hooghe and G. Marks, Types of Multi-level Governance, *European integration Online Papers* Vol 5, No 11, 2001,

Dalam penelitian ini, Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode dekriptif dan eksplanatif atau dikenal dengan *mix method*. Metode dekriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta upaya yang dilakukan Provinsi Kalimantan Barat dalam Praktik diplomasi bencana. Dengan menemukan fakta-fakta tersebut, penulis akan menemukan upaya yang telah dilakukan. Kemudian dengan metode eksplanatif penulis menjelaskan mengapa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum maksimal mengimplementasikan praktik diplomasi bencana dalam merespon bencana Kabut Asap tahun 2015.

2. Lokasi dan jangkauan Penelitian

Untuk menghindari pelebaran maka dibutuhkan jangkauan penelitian yang berfungsi untuk memfokuskan penelitian ini. Jangkauan penelitian ini dimulai sejak tahun 2015 sampai 2016.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisisnya. Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Penelitian ini merupakan penelitian dekriptif-explanatif (*mix method*), dimana dalam menjelaskan permasalahan yang diteliti tergantung pada validitas data informan yang memberikan informasi dalam penelitian ini serta asumsi teori yang dibangun/digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang diantaranya berasal dari sumber-sumber berikut, yaitu:

a. Dokumen

Dokumen-dokumen dalam hal ini digunakan untuk menelusuri berbagai dokumen baik itu tertulis maupun dokumen dalam bentuk gambar/foto yang berkaitan dengan fokus penelitian, utamanya menyangkut dokumen mengenai bencana alam yang terjadi. Disamping itu, teknik dokumentasi yang digunakan

dalam penelitian ini menitikberatkan pada catatan–catatan atau arsip–arsip berupa jurnal, buku, laporan tertulis dan dokumen–dokumen berkaitan dengan objek yang diteliti dari instansi terkait.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data observasi ini, penulis lakukan untuk mengetahui manajemen penanggulangan benacn kabut asap di Kalimantan Barat.

c. Wawancara

Penentuan informan dilakukan dengan sebuah kriteria yakni dengan mempertimbangkan dan memilih informan yang dipilih dan dipandang mengetahui secara jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti dalam hal ini, yaitu sebagai berikut:

1. **Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat:** Untuk dapat mengetahui Komando yang dilakukan dalam Penangulangan Bencana Kabut Asap 2015.
2. **Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Provinsi Kalimantan Barat:** Mengetahui Peran Advokasi yang dibangun oleh WALHI dalam respon bencana kabut asap
3. **Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat:** Untuk mengetahui peran Pencegahan dan Fasilitator yang dilakukan dalam upaya penanggulan Bencana Kabut asap
4. **Kepala Badan Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Barat:** Untuk dapat mengetahui upaya pencegahan dan penanggulan bencana kabut asap serta Keberadaaan bantuan JICA di Kalimantan Barat
5. **Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Unit Kebakaran Hutan dan Lahan :** Untuk Mengetahui Praktik Program JICA di Provinsi Kalimantan Barat

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mengutamakan teknik wawancara melalui face to face, dan dokumen –dokumen terkait dari instansi yang dapat menunjang jalannya penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang

ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I. Pendahuluan, akan menggambarkan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, originalitas riset, tinjauan pustaka, kerangka teori, jenis penelitian, lokasi dan jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II Kondisi Kebencanaan Di Indonesia, akan berisi gambaran umum mengenai sejarah bencana di Indonesia dan Provinsi Kalimantan Barat. Pada bagian ini merupakan berisi uraian-uraian deskripsi Profil Kebencanaan di Indonesia dan Provinsi Kalimantan Barat.

BAB III Praktik Diplomasi Bencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Menanggulangi Bencana Kabut Asap, akan menggambarkan Upaya Paraktik Diplomasi Bencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam Penanggulangan Bencana Kabut Asap. Pada bagian ini merupakan uraian eksplanasi untuk menjelaskan dari data yang ditemukan, dilakukan analisa menggunakan teori dan konsep pendukung.

BAB IV Multi Level Governance Dalam Penanggulangan Bencana Kabut Asap, akan membahas tentang Multi Level Governance dalam Penanggulangan Bencana Kabut Asap. Pada bagian ini merupakan uraian eksplanasi untuk menjelaskan dari data yang ditemukan, dilakukan analisa menggunakan teori dan konsep pendukung

BAB V PENUTUP dari hasil pembahasan di bab-bab sebelumnya.